



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 1826, 2015

ANRI. Retensi Arsip. Badan Usaha. Persemenan  
dan Perkeretaapian. Pedoman.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BADAN USAHA  
BIDANG PERSEMENTAN DAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Badan Usaha Bidang Persemenan dan Perkeretaapian;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BADAN USAHA BIDANG PERSEMENAN DAN PERKERETAAPIAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

7. **Arsip Statis** adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. **Jadwal Retensi** Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. **Arsip Nasional Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
10. **Badan Usaha Milik Negara** yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. **Badan Usaha Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.
12. **Unit Pengolah** adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13. **Unit Kearsipan** adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan

arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

14. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
15. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

### **Pasal 2**

- (1) **Pedoman Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Persemenan dan Perkeretaapian** disusun oleh ANRI bersama dengan BUMN terkait.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Persemenan dan Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 3**

- (1) **Pedoman Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Persemenan dan Perkeretaapian** memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) **Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.**
- (3) **Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:**

- a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
- b. 10(sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

#### **Pasal 4**

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

#### **Pasal 5**

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

#### **Pasal 6**

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Persemenan dan Perkeretaapian digunakan untuk menyusun JRA BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip Urusan Badan Usaha.

- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintahan daerah:
- a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2015

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MUSTARI IRAWAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**WIDODO EKATJAHJANA**

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDIOMAN RETENSI URUSAN BALDAN USALIA  
BIDANG PERSEMENAN DAN TERKERETAAPLAN

PEDIOMAN RETENSI URUSAN BALDAN USALIA

a. Bidang Persemenan

No	Jenis/Series Arsip	Ketensi	Tahun
1	2	3	5
1	<b>KEBIJAKAN</b> Rumusan kebijakan perusahaan yang terkait dengan rencana dan pengembangan produksi, penjualan, distribusi, kesiabilitan, kewajiban dan keselamatan lingkungan kerja, pendirian perusahaan, penetapan anggaran dasar perusahaan, perizinan, perjanjian (kontak) kerja, logo (identitas) perusahaan, lingkungan kerja, kebijakan operasional. - Nasihat akademik/Relaah Kajian - Analisa data dan informasi - Kajian dan analisa - usulan kebijakan - rekomendasi - rumusan dan penyusunan materai/bahan kebijakan - masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - rancangan kebijakan - Pencairan dalam bentuk NSPK		
2	<b>PRODUKSI</b> A. Produksi Isianan Isolasi		

No	Jenis/Series Arsip	Rencensi
1	2	3
1.	1. Rencana Produksi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana produksi perusahaan</li> <li>b. Target perusahaan</li> <li>2. Realisasi Produksi</li> </ul>	3 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan energi, bahan baku, penolong dan penunjang, dan kemasan [kantong]</li> <li>b. Hasil pengujian mutu produk dan bahan</li> <li>c. Data pengeluaran produk</li> </ul>	3 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi kinerja peralatan produksi dan mutu produk           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan harian</li> <li>b. Laporan periodik</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Item Master</li> </ul>	5 Tahun
	<b>B. Produksi Terak/Klinker</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Produksi           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana produksi perusahaan</li> <li>b. Target perusahaan</li> </ul> </li> <li>2. Realisasi Produksi</li> </ul>	3 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan energi, bahan baku, penolong dan penunjang, dan kemasan [kantong]</li> <li>b. Hasil pengujian mutu produk dari bahan</li> <li>c. Data pengeluaran produk</li> </ul>	2 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi kinerja peralatan produksi dan mutu produk           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan harian</li> <li>b. Laporan periodik</li> </ul> </li> </ul>	3 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Item Master</li> </ul>	3 Tahun
	<b>C. Produksi Semen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Produksi           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana produksi perusahaan</li> </ul> </li> </ul>	3 Tahun

No	Jenis/Series Arsip	Ketentuan
1	I. Target pencapaian 2. Realisasi Produksi	5 Tahun
	a. Penggunaan energi, bahan baku, pengolong dan pemungas, dan kemasan (kantong) b. Hasil pengujian mutu produk dan bahan c. Data pengeluaran produk Pengeluaran sementara - Pengeluaran kilometer 3. Dukuhasi kinerja perelatan produksi dan mutu produk a. Laporan harian b. Laporan perdiklik 4. Item Master	2 Tahun
		5 Tahun
3	<b>IMPLEMENTASI PENGETAHUAN</b> A. Penelitian 1. Survey 2. Studi kelayakan 3. Aplikasi produk 4. Laporan penelitian 5. Laporan penelitian (produk, kemasan, lingkungan dan pengujian legami) B. Rancangan bangunan 1. Rancangan peralatan utama 2. Rancangan peralatan penunjang produksi 3. Rancangan pemasaran dan sarana C. Pengembangan 1. In bound/ logistic manajemen 2. Belanja modal (Capex manajemen)/ manajemen investasi 3. Capacity manajemen	5 Tahun



No	Jenis/Series Arsip	Ketensi
1	2	3
1	<p>A Perencanaan</p> <p>B Strategi dan Pengembangan Pemasaran</p> <p>C Kehilangan Pasar</p> <p>1. Pasar Dalam Negeri</p> <p>2. Pasar Luar Negeri</p> <p>D Penjualan</p> <p>1 Distributor</p> <p>a Penetapan distributor</p> <p>b Evaluasi distributor</p> <p>2 Realisasi penjualan Dalam Negeri</p> <p>3 Realisasi penjualan luar negeri</p> <p>E Survey Kepuasan Pelanggan</p> <p>F Evaluasi Program</p> <p>G Evaluasi Pemasaran</p> <p>a. Evaluasi pasar dalam negeri</p> <p>b. Evaluasi pasar luar negeri</p> <p>c. Harga Pasar</p> <p>H Promosi Pemasaran</p> <p>1 Barang</p> <p>2 Jasa</p> <p>3 Pelayanan teknis</p> <p>4 Pemberian Rewards</p> <p>I Komunikasi Pemasaran</p> <p>J Pelayanan Pelanggan</p>	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
6	<p>DISTRIBUSI DAN TRANSPORTASI</p> <p>A Transportir</p> <p>1 Evaluasi transparir</p>	5 Tahun

No	Jenis/Series Arsip	Rencensi
1	2 Penyajikan transportir 3 Penberlebihan transportir	3
B	Distribusi dan transportasi laut <b>1 Rencana kebutuhan penggunaan kapal</b> 2 Rencana realisasi pemutatan barang 3 Time slot dan round voyage 4 Berita acara bongkar	3 Tahun
C	Distribusi dan transportasi darat <b>1 Rencana kebutuhan penggunaan angkutan darat</b> 2 Rencana/Realisasi pemutatan barang 3 Pemututan semen/klinker 4 Pengiriman semen/klinker 5 Pemututan semen/klinker	3 Tahun
7	PENGELARAN A Peralatan produksi 1 Alat tambang 2 Raymond 3 Kiln dan Coal mill 4 Cement mill 5 Packing plant 6 Alat transport B Peralatan pemutianang produksi 1 Alat berat 2 Alat bantuan C Peralatan taji muji 1 Alat kafibrasi	3 Tahun 2 Tahun

No	Jenis/Series Arsip	Ketensi
1	2	3
1	2 Alatukur 1) Energi Listrik 1 PLTA 2 PLTD 3 Gardu Induk 4 WILRIG  5 Distribusi  E Sistem Informasi 1 Hardware 2 Software 3 Jaringan Komunikasi 4 Aplikasi Sistem	2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun  2 Tahun 5 Tahun

## b. Bidang Perkeretaapian

No	Jenis/Status Aset	Retaisi
	2	3
1	<b>KELUJAKAN</b> Rumusan kebijakan yang terkait dengan rencana dan pengembangan komersialisasi angkutan dan non angkutan, penjaminan mutu dan alat-alat kesehatan dan penggunaan terbatas dengan keselamatan, keamanan dan keselarasan lingkungan kerja, kebijakan operasional kereta api, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasional akademik/Teknisi kebijakan</li> <li>- Analisa data dan informasi</li> <li>- kebijau dan analisa usulan kebijakan</li> <li>- rekomendasi</li> <li>- rumusan dan pernyataan materi/ bahan kebijakan</li> <li>- rancangan dan dukungan dalam perusuman kebijakan</li> <li>- rancangan kebijakan</li> <li>- penetapan dalam bentuk NSPK</li> </ul>	5 Tahun
2	<b>Komersialisasi Kereta Api</b> A. Perencanaan dan Pengembangan Komersialisasi Angkutan dan Non Angkutan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permininan kebutuhan fasilitas pendukung kegiatan komersialisasi di perusahaan</li> <li>2. Desain rencana peringkatkan komersialisasi dan pelayanan</li> <li>3. Perizinan komersialisasi dan pelayanan</li> </ol> B. Pelaksanaan Komersialisasi Angkutan dan Non Angkutan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reba hilirisasi, perbaikan, modernisasi, dan normalisasi sistem dan prosedur yang digunakan dalam kegiatan komersialisasi</li> <li>2. Persyaratan angkutan pemungut biaya (SAI), KAI, Railcard, dll dan barang</li> <li>3. Komersialisasi angkutan pemungut biaya (tarif dan angkutan)</li> </ol> C. Sewa atau kSO kereta/garibong/ space iklan/tv/desainer shop	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 10 Tahun

No	Jenis/Seriés Arsip	Retensi
1	2	3
3	Sewa atau KSO tanah/bangunan dinas/rumah dinas/jalur KA/sepur simpang/space lilitan 6 Asuransi dalam kegiatan komersialisasi 7 Layanan pelanggan baik angkutan maupun non angkutan	10 Tahun 10 Tahun 2 Tahun
8	Pengawasan dan evaluasi komersialisasi Angkutan dan Non Angkutan Pemeriksaan, pengujian, dan perbaikan sistem atau prosedur yang digunakan dalam kegiatan 1 Komersialisasi 2 Pengawasan terhadap pihak lain yang berhubungan dengan layanan komersialisasi 3 Sarana/pengdaman pelajaran dari pelanggan ataupun stakeholder	5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun
9	3 OPERASIONAL KERETA API A. Program Ketrilateral Operasional Kereta Api 1. Ijin operasional kereta api 2. Kelolahan fasilitas dalam kegiatan operasional 3. Pattività nama, singkatan, jenis, dan klasifikasi stasiun untuk pengoperasian kereta api  B. Pelaksanaan Operasional Kereta Api 1. Operasional angkutan barang 2. Operasional angkutan penumpang 3. Administrasi yang ada di di stasiun meliputi kegiatan kedinasan dan operasional yang berkaitan dengan pengoperasian kereta api Jadwal pejalanan kereta api, WAM, Gajakka, dan Maka Persilangan ; penyusulan, jadwal/time table/route/lokasi yang terkait dengan operasional kereta api Peluncuran, dan pembatalan perjalanan kereta api yang berhubungan dengan 5 pengoperasional kereta api 6 Crew yang terkait dengan operasional kereta api	10 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun

No	Jenis/Seriés Arsip	Ketensi
	1	2
		3
C Pengawasari dan Evaluasi Operasional Kereta Api		
1 Pengawasari terhadap pihak lain yang berhubungan dengan operasional kereta api (mitra)	5 Tahun	
2 Pengaduan/sarana tentang operasional kereta api	2 Tahun	
3 Laporan gangguan, kecelakaan, dan PLH yang terjadi dalam pengoperasional kereta api	2 Tahun	
4 Peristiwa luar biasa hebat (PLH) dalam pengoperasional kereta api	5 Tahun	
4 PRASARANA KERETA API		
A Pengembangan Prasarana Kereta Api		
1 Buatan kebutuhan fasilitas dan suatu cakupan prasarana kereta api	2 Tahun	
Perizinan penggunaan prasarana kereta api (izin pembangunan jalan rel, jembatan, perwalian		
2 sinyal, telekomunikasi, listrik aliran atas, stasiun)	10 Tahun	
3 Jenis dan klasifikasi stasiun yang berkaitan dengan bidang prasarana	5 Tahun	
4 Persyaratan teknis penggunaan prasarana kereta api	2 Tahun	
5 Desain rencana permantangan prasarana kereta api (rencana perwalian dan pembangunan		
jalan rel, jembatan, perwalian shiyal, telekomunikasi, listrik aliran atas, stasiun)	5 Tahun	
6 Gambar/konstruksi bidang prasarana	5 Tahun	
B Perleburuan Prasarana Kereta Api		
1 Sembilan prasarana (titik kilometer)	5 Tahun	
2 Simbol/tanda lalu lintas di jalan umum	5 Tahun	
3 Dokumen jenis mesin/perkakas yang digunakan pada pekerjaan bidang prasarana	5 Tahun	
4 Dokumen material/suku cadang bidang prasarana	5 Tahun	
5 Perlakuan (petugas, Pv over, underpass, dll) yang terkait dengan prasarana kereta api	2 Tahun	

No	Jenis/Seriés Arsip	Ketensi
1	2	3
6	Tanggungan resin/ klar (seperti : batas sungai, selokan, gor, pintu air, bendungan, pelabuhan)	5 Tahun 5 Tahun
7	Sistem pengawau/ seutiesi	5 Tahun 5 Tahun
8	Vakumel, terowongan, Dryver, dan underpass	5 Tahun 5 Tahun
9	Audias pendeksi/profil/konstruksi bidang prasarsa	5 Tahun 5 Tahun
10	Pembangkit, transformasi, distribusi listrik, LAA dan sistem kelistrikan	5 Tahun 5 Tahun
11	Sistem persinyalan/NX, alat komunikasi seperti: telepon, HT, fax, Telex, Server, Jaringan dll	5 Tahun
C	Penelitian dan Pengembangan Kebela Api	
	Pengoprasian, rehabilitasi, perawatan, perbedaan, modernisasi, normalisasi, bandesi dan standarisasi	2 Tahun 2 Tahun
1	Perbaikan, pemeliharaan, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi prasarana KA (sertifikat uji standarisasi)	5 tahun
2	Canggungan/kerusakan prasarana kereta api	
1)	Evaluasi prasarana	
1.	Bina Mitra	
1.	Pemeliharaan, pengujian, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi prasarana KA (sertifikat uji standarisasi)	5 tahun
2.	pertama dan uji berikala jalan rel, jembatan, perawatan sinyal, telekomunikasi, listrik aliran air, stasiun	2 Tahun
5	STANDAR KERETA API	
A	Pengembangan Pengoperasian Kereta Api	
	Dafar kebutuhan fasilitas, material sinku cadang, sanku cadang, komponen, bahan bakar,	5 Tahun 5 Tahun
1	petruas, dll	5 Tahun 5 Tahun
2	Bahan type/jenis lok/kereta/gerbong	5 Tahun 5 Tahun
3	Syarat teknis dalam penggunaan sarana	5 Tahun 5 Tahun
1	Dessain didefinisikan kegiatan pokok jasa sarana kereta api	5 Tahun 5 Tahun
3	Kerizinan pengoperasian sarana	5 Tahun 5 Tahun
6	Gambar/konstruksi sarana	



No	Jenis/ Series Arsip	Retensi
1	2	3
	Penyekaman/pengujian/ periksaan yang terkait dengan keselamatan/ keamanan/kesehatan 6. lingkungan kerja 7. lingkungan lingkungan Bina unita (IN, INI, INIK), Security service, Rumah Sakit dkk) terkait dengan keselamatan/keamanan, keselamatan lingkungan kerja	5 Tahun 2 Tahun

KEPALA ASESOR YASIONA, REPUBLIK INDONESIA

1td.

MUSTARI IRRAWAN